

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik sangat identik dengan organisasi pemerintahan yang kegiatannya berdasarkan kepentingan masyarakat. Pemerintah selayaknya senantiasa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat tetapi fakta yang terjadi di lapangan jauh dari kenyataan R. C. Dewi & Suparno (2022) Dwiyanto (2021). Hal ini terlihat dari kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki pemerintah tetapi tidak dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sandiasa & Agustana, (2018) Teja (2015). Salah satu penyebab yang menjadikan tidak maksimalnya pelayanan publik kepada masyarakat adalah karena adanya praktik yang merugikan negara seperti penyimpangan secara tidak langsung dapat membuat masyarakat menjadi dirugikan Ashok et al.,(2021) dan penyimpangan itu sering terjadi dalam bentuk kecurangan. Menurut Lukman & Harun (2018), kecurangan sebagai sebuah istilah sesuatu yang tidak benar, yang artinya untuk memperoleh keuntungan dengan kepentingan tujuan pribadi ataupun organisasi. Konsep yang membahas terkait motivasi seseorang adalah teori *fraud tringle* yang diuraikan dalam SAS 99 (AU316), teori *fraud* seperti tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan sikap (*rasionalisasi*) (Siddiq & Hadinata, 2016). (Siddiq & Hadinata, 2016)

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu kecurangan akuntansi Hashim et al., (2020) Young (2020). Teori kecurangan dalam konsep akuntansi merupakan bagian prosedur kecurangan akuntansi, kecurangan akuntansi diartikan bagian laporan keuangan yang disengaja dilaporkan secara curang dan penyalahgunaan Liao et al., 2019; Ramos Montesdeoca et al., (2019). Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya ancaman serius bagi pemangku kepentingan yang dilihat dari peningkatan kejahatan ekonomi. Kecurangan akuntansi dapat menimbulkan adanya kerugian dalam dunia pekerjaan dan kerugian ini menjadi masalah serius yang perlu ditindaklanjuti (Arifin, 2020; Mangala & Kumari, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan untuk menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi yang dapat mempengaruhi keputusan. Laporan keuangan yang baik selalu terkendala oleh tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kecurangan ini dipengaruhi oleh faktor organisasi (eksternal), faktor dari dalam diri individu (internal) serta lemahnya pengendalian internal. Individu dengan tingkat integritas tinggi dan tekanan (kebutuhan) serta kesempatan terbatas untuk melakukan kecurangan cenderung bersikap jujur, sebaliknya individu yang integritas pribadinya kurang, ketika ditempatkan dalam situasi tekanan kebutuhan meningkat dan diberikan kesempatan cenderung melakukan kecurangan asalkan kebutuhannya terpenuhi. Begitu pula halnya dengan pengendalian internal. Jika pengendalian internal lemah akan mengakibatkan kekayaan atau aset suatu negara yang dikelola pemerintah daerah tidak terjamin keamanannya.

Instansi pemerintahan mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan suatu pemerintahan. Terkait dengan pencapaian tujuan pemerintah tersebut maka harus didukung dengan perilaku atau tindakan baik dari para pegawainya. Namun, pada kenyataannya banyak kasus kecenderungan kecurangan akuntansi yang terjadi di kalangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (KKA) telah mendapatkan banyak perhatian media sebagai dinamika yang sering terjadi. Terdapat opini bahwa KKA dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan. Kecurangan akuntansi telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia. salah satu bentuk kecurangannya yaitu tindakan korupsi.

Menurut Wilopo (2006) pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi, tindakan yang biasa dilakukan adalah memanipulasi, pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Selain kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA),

perilaku tidak etis juga mempengaruhi banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di Indonesia. Perilaku tidak etis yaitu perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Perilaku tidak etis dapat berupa penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, penyalahgunaan sumber daya, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Keefektifan pengendalian internal merupakan faktor yang berpengaruh terhadap adanya kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis. Pengendalian internal yang lemah dapat memberikan peluang seseorang untuk melakukan perilaku tidak etis yang akan berujung pada terjadinya kecurangan akuntansi yang akan merugikan suatu instansi atau lembaga. Faktor lain yang menyebabkan maraknya tindakan kecurangan akuntansi di Indonesia adalah ketaatan aturan akuntansi. Suatu instansi atau lembaga akan melakukan tindakan kecurangan karena tidak berpedoman pada aturan akuntansi yang berlaku.

Terkait masalah hal-hal yang mempengaruhi kecurangan akuntansi pada sektor pemerintahan, tidak terlepas dengan adanya karakteristik suatu organisasi dimana karakteristik itu sendiri merupakan perilaku dan tingkah laku suatu instansi terhadap kondisi yang ada di luar instansi itu maupun di dalam instansi itu sendiri, artinya dalam dunia bisnisnya selalu fokus kepada pelanggannya yang bukan hanya dari luar instansi tetapi juga orang-orang di dalam instansi merupakan aset instansi itu sendiri Tjahyono (2013). Terdapat berbagai macam bentuk karakteristik suatu organisasi yang diungkapkan dari beberapa jurnal referensi diantaranya-Nya pengendalian internal, ketaatan pada aturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, moralitas aparat, asimetri informasi, budaya etis organisasi, kepuasan kerja, dan gaya kepemimpinan.

Penelitian ini membahas masalah yang terdiri dari budaya etis organisasi, Keadilan organisasi, dan Moralitas Aparatur. Karena peneliti ingin mengungkap masalah kecurangan akuntansi suatu instansi. Oleh karena itu diturunkan variabel yang sangat berhubungan langsung terhadap kecurangan akuntansi. Dalam penelitian ini kecurangan akuntansi menjadi variabel dependen dan kualitas pengendalian internal sebagai variabel moderasi.

Menurut Fachrunisa (2015), Budaya etis organisasi dapat berarti sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu maupun kelompok anggota

organisasi, secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan tujuan dan filosofi organisasi yang bersangkutan. Etika mencakup analisis dan penerapan seperti konsep baik, benar, salah tanggung jawab dan buruk dalam melakukan berbagai hal.

Menurut Julyana (2015), Budaya etis organisasi terkait norma, sistem nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota organisasi yang memengaruhi berperilaku dan cara bekerja dari para anggota organisasi agar terciptanya beretika dan perilaku baik, dan menghindari tindakan yang dapat merugikan organisasi. Perilaku tidak etis juga memengaruhi banyaknya penyimpangan yang terjadi di Indonesia.

Secara umum keadilan digambarkan sebagai situasi sosial ketika norma-norma tentang hak dan kelayakan dipenuhi Yuliana (2016). Agar karyawan menganggap adil sebuah proses, mereka harus merasa bahwa mereka diberi penjelasan yang memadai tentang alasan munculnya hasil tersebut. Sangat penting bagi manajer konsisten terhadap individu pada saat apapun, tidak berlaku tidak adil, membuat keputusan dasar informasi yang akurat, dan terbuka terhadap pertimbangan Fachrunnisa (2015). Oleh karena itu ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil sesuai dengan hasil kerjanya, maka akan sangat kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi.

Menurut Li (2015) mengemukakan bahwa kualitas pengendalian internal perusahaan dapat ditentukan dengan fitur khusus perusahaan, kualitas audit dan tata kelola perusahaan. Sedangkan menurut Julyana (2015), Tarigan (2016) mengemukakan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal termasuk dalam kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. Sistem pengendalian internal yang efektif membantu dalam mendapatkan hasil monitoring yang baik (Bestari, 2016).

Menurut Wilopo (2006) mendefinisikan kecurangan akuntansi sebagai tindakan, cara, penyembunyian dan penyamaran yang tidak semestinya, secara sengaja dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Bastian (2007) mengelompokkan kecurangan akuntansi terdiri dari tindakan (1) manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan dan dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. (2) representasi yang salah atau penghapusan yang disengaja atas transaksi-transaksi dan informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. serta (3) salah penerapan yang disengaja atas prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan akuntansi terkait dengan tindakan ingin melakukan, yang mengakibatkan terjadinya salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan karena adanya penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan yang timbul dari perlakuan tidak semestinya (Kristiana 2016).

Di dalam sebuah organisasi, tentu sangat membutuhkan moralitas para aparatur yang baik agar tercipta kualitas organisasi yang baik pula. Moralitas aparatur merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau organisasi dengan para personil yang memiliki penalaran moral yang rendah akan memicu terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan akuntansi. Dan sebaliknya, instansi yang para personilnya memiliki penalaran moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan Radhiah (2016). Pemerintahan yang baik akan terbentuk dengan adanya moralitas yang baik.

Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila perilakunya mencerminkan moralitas, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana Amalia (2015) menjelaskan bahwa moralitas berkaitan dengan orang lain bukan hanya mengenai kepentingan pribadi. Serta moralitas merupakan pemikiran yang objektif dan rasional. Moralitas yaitu pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum, sedangkan hukum itu sendiri tertulis dalam hati nurani manusia. Dengan kata lain, moralitas merupakan tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak.

Penelitian yang dilakukan Pristiyanti (2018) mengemukakan keadilan organisasi tidak mempunyai berpengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. karena fenomena yang terjadi saat ini di Indonesia justru para koruptor itu sendiri mempunyai jabatan yang tinggi dan pastinya mempunyai gaji yang besar. Tindakan *fraud* tersebut tetap saja dapat terjadi karena adanya faktor keserakahan yang dimiliki oleh setiap individu. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Adi (2016) dan Sumbayak (2017) yang menyatakan keadilan organisasi memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kecurangan (*Fraud*). Dalam penelitian ini para pegawai instansi pemerintah beranggapan bahwa prosedur penggajian dan pemberian kompensasi di instansi sesuai dengan yang diinginkan pegawai, serta melibatkan pegawai sehingga prosedur tersebut dapat diterima dengan baik.

Menurut Faisal (2017) mengemukakan dalam penelitiannya kultur organisasi tidak pengaruh terhadap *fraud* di sektor pemerintah. Alasannya, terdapat dua faktor yang dapat memengaruhi seorang individu dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari berupa rangsangan atau pengaruh faktor lingkungan. Sedangkan faktor internal berasal dari faktor-faktor yang ada dalam diri individu, seperti pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi. Hal tersebut yang dapat memengaruhi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan yaitu keinginan bergaya hidup mewah dan keserakahan individu. Peneliti ingin mengukur tingkat pengaruh organisasi yang terdiri dari budaya etis organisasi, Keadilan Organisasi dan Pengendalian Internal terhadap kecurangan akuntansi di SKPD Kota Bengkalis dengan menggunakan moralitas aparatur sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan di SKPD Kota Bengkalis karena Bengkalis merupakan salah satu kota yang paling berpengaruh dan menjadi pusat perhatian publik dalam sektor pemerintahan. Berdasarkan masalah-masalah yang ditemui dalam pra penelitian hal ini dicantumkan oleh salah satu situs Online antikorupsi.org, Riau mengutip pernyataan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi diurutkan ke 10 dalam hal kasus korupsi di Indonesia.

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi yaitu kecurangan akuntansi Hashim et al & Young (2020). Teori kecurangan dalam konsep akuntansi merupakan bagian prosedur kecurangan akuntansi, kecurangan akuntansi diartikan bagian laporan keuangan yang disengaja dilaporkan secara curang dan penyalahgunaan Liao et al & Ramos Montesdeoca et al (2019). Kecurangan akuntansi terjadi karena adanya ancaman serius bagi pemangku kepentingan yang dilihat dari peningkatan kejahatan ekonomi. Kecurangan akuntansi dapat menimbulkan adanya kerugian dalam dunia pekerjaan dan kerugian ini menjadi masalah serius yang perlu ditindaklanjuti (Arifin, 2020; Mangala & Kumari, 2017).

Di Indonesia sering terjadi kasus tindakan yang sengaja informasinya yang benar disembunyikan dan memanipulasi laporan keuangan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya tindakan yang tidak benar terkait akuntansi yang ada di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Salah satu bentuk kasus kecurangan akuntansi yang terjadi diantara-Nya adanya temuan penyelewengan dana perjalanan dinas fiktif di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dilakukan oleh KPA, KPA, PPTK, dan Bendahara di Dispenda Bengkalis. Dalam dakwaan jaksa, terdakwa telah melakukan kegiatan SPPD fiktif tersebut pada tahun 2012 dan 2013. Hasil pemeriksaan (BPKP) Riau, tindakan terdakwa merugikan negara sebesar Rp290 juta. Selain kasus perjalanan dinas fiktif, pada tahun 2017 terjadi tindakan manipulatif dan pemalsuan dokumen perjalanan dinas di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Kasus temuan ini berawal dari laporan hasil pemeriksaan (LPH) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dalam penyusunan laporan keuangan terdapat temuan realisasi belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi kenyataan diantara-Nya harga tiket penerbangan yang tidak sesuai dengan harga tiket yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.76.696.686,00.

Kecurangan akuntansi tidak mampu terlepas dari adanya teori agensi yang dapat dijelaskan dengan hubungan antara pemerintah (agent) dengan pihak pemberi amanah sebagai pengguna Heald (2018). Pemerintah bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat(prinsipal) dan

biasanya kepentingan yang berbeda di dalam pemerintahan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai keinginan yang dikehendaki. Permasalahan ini mampu berdampak pada manipulasi data yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki Ramadhany (2017). Permasalahan tersebut timbul karena adanya kesenjangan informasi yang terjadi dikarenakan kedua belah pihak pemerintahan tidak memiliki informasi yang sama dalam menentukan kontribusi terkait adanya prospek kerja pemerintahan terhadap evaluasi instansi yang sebenarnya (SELA, 2021; Zhang & Xu, 2021).

Menurut Malau & Parhusip (2015) mengungkapkan bahwa asimetri informasi adalah kondisi dimana perolehan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, perwakilan rakyat, dan legislatif. Asimetri informasi juga merupakan faktor penting yang menyebabkan seseorang bertindak curang. Bila terjadi asimetri informasi, seseorang akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tentunya, hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku principal. Semakin tinggi asimetri informasi yang terjadi didalam sektor publik maka akan mampu meningkatkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang merugikan negara.

Kecurangan adalah bagian dari perbuatan yang dilakukan dengan secara sengaja dengan penyalahgunaan yang salah seperti sumber daya perusahaan yang dipentingkan untuk kepentingan sendiri dan menyampaikan informasi dengan tidak benar dalam menutupi penyalahgunaan itu Manurung & Hardika (2015). Sehingga informasi yang tidak benar dapat timbul dikarenakan budaya pada organisasi yang tidak baik. Karena budaya organisasi adalah bagian pemikiran yang dibelajarkan kepada personel untuk dapat berpikir, bertindak dengan benar. Budaya organisasi diciptakan sesuai individu, etika organisasi dan hak kepegawaian yang ditujukan kepada pegawai dan struktur organisasi. Budaya organisasi juga membentuk dan mengendalikan perilaku dalam keorganisasian Putra & Latrini (2018). Budaya organisasi diartikan dengan bagaimana cara seseorang merespons dan menafsirkan situasi yang dalam permasalahan tersebut. Begitu pula dengan melakukan Tindakan kecurangan, apabila individu didalam organisasi dapat menafsirkan segala situasi

dan permasalahan dengan baik maka akan mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan dalam bekerja (Tutu, 2022)

Dari penjelasan diatas faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara langsung dalam meningkatkan ataupun menurunkan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah. Namun, diantara faktor-faktor tersebut terdapat satu faktor lainnya yang mampu memperkuat ataupun memperlemah kasus kecurangan akuntansi yang terjadi. Sistem pengendalian internal mempunyai peran penting dalam mengurangi kecurangan. Sistem ini efektif untuk menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis dalam kecenderungan dalam berlaku curang dalam hal akuntansi Adi et al (2016). Tanpa adanya sistem ini juga didalam organisasi, seseorang tidak akan mampu melakukan perilaku yang tidak etis. Sistem ini efektif membantu dalam monitoring hasil Indriastuti et al (2017). Semakin meningkatkan pengawasan ataupun monitoring dari dalam akan mampu menjadi sebuah fondasi yang menopang lingkungan organisasi untuk tidak berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Keefektifan sistem pengendalian internal yang baik akan mampu memperkuat hubungan setiap variabel yang mampu menurunkan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal tidak dilakukan dengan baik maka akan mampu memperlemah hubungan setiap variabel yang mampu meningkatkan kecurangan akuntansi (Aswad et al 2018) (Fadhilah et al 2021).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti kembali terkait kecurangan akuntansi yang terjadi terkhususnya pada pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis. Penulis merasa masih perlu diteliti berdasarkan fenomena yang terjadi masih tingginya kasus kecurangan akuntansi yang menyebabkan kerugian negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Keadilan Organisasi Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Akuntansi Dengan Penguatan Kualitas Pengendalian Internal SKPD Di Kota Bengkalis”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Moralitas individu merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Suatu instansi atau organisasi dengan para personil yang memiliki penalaran moral yang rendah akan memicu terjadinya tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan akuntansi. Sebaliknya, instansi yang para personilnya memiliki penalaran moral yang tinggi lebih cenderung menghindari perbuatan yang mengarah kepada kecurangan (Radhiah, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
2. Apakah Keadilan Organisasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
3. Apakah Moralitas Aparatur berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi?
4. Apakah Kualitas Pengendalian Internal aparatur SKPD menguatkan budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi?
5. Apakah Kualitas Pengendalian Internal aparatur SKPD menguatkan Keadilan Organisasi terhadap kecurangan akuntansi?
6. Apakah Kualitas Pengendalian Internal aparatur SKPD menguatkan Kualitas Pengendalian Internal terhadap kecurangan akuntansi?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah sehingga penelitian yang dilakukan bisa lebih fokus untuk menggali masalah pada Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Keadilan Organisasi Dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Akuntansi Dengan Penguatan Kualitas Pengendalian Internal SKPD Di Kota Bengkulu.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi
2. Untuk mengetahui pengaruh Keadilan Organisasi terhadap kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Moralitas Aparatur terhadap kecurangan akuntansi.
4. Untuk mengetahui Kualitas pengendalian internal aparatur SKPD dalam menguatkan budaya etis organisasi terhadap kecurangan akuntansi.
5. Untuk mengetahui Kualitas pengendalian internal aparatur SKPD dalam menguatkan Keadilan Organisasi terhadap kecurangan akuntansi.
6. Untuk mengetahui Kualitas pengendalian internal aparatur SKPD dalam menguatkan Kualitas Pengendalian Internal terhadap kecurangan akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran diri para aparatur SKPD agar tidak melakukan kecurangan akuntansi, karena akan berdampak pada masyarakat luas. Selain itu diharapkan agar budaya dan keadilan suatu organisasi lebih ditingkatkan sehingga para aparatur lebih mempertimbangkan apabila ingin melakukan tindakan kecurangan akuntansi.
2. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis
Hasil Penelitian ini diyakini dapat memberikan informasi yang berguna dan referensi lebih lanjut untuk studi masa depan tentang topik yang berkaitan dengan kecurangan akuntansi, khususnya Program Studi D-IV Akuntansi Keuangan Publik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah memahami isi penulisan yang disajikan. Maka peneliti membuat suatu sistematis penulisan untuk menjelaskan secara ringkas rencana isi dari bagian yang disusun sebagai berikut.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematis penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN